

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah berakhirnya masa Orde Baru dengan ditandai reformasi konstitusi untuk mengatur sistem pemerintahan. Di antara kebijakan penting yang diimplementasikan adalah penyelenggaraan pemilihan umum dengan menganut prinsip-prinsip demokrasi setiap lima tahun sekali. Salah satu bentuk demokrasi di tingkat daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digunakan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mekanisme penyelenggaraan Pilkada di Indonesia diatur sedemikian rupa bahwa rakyat memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung melalui pemungutan suara (Indonesia, 2016). Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan demokrasi yang sehat tanpa adanya penyimpangan serta sesuai dengan aturan. Selain itu, terdapat Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu (Fransisca dkk., 2023, hlm. 3).

Berdasarkan artikel berita Kompas.id, setelah berakhirnya masa rezim otoriter Presiden Soeharto tahun 1998 politik uang di Indonesia mulai tumbuh subur hingga saat ini. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati juga menegaskan bahwa baik kandidat maupun masyarakat pada saat ini cenderung permisif terhadap praktik politik uang menjelang pemilihan. Di zaman yang serba digital ini, politik uang juga ikut bertansformasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik politik uang semakin dilakukan secara terang-terangan,

contohnya dalam bentuk *giveaway* di sosial media maupun transfer uang di dompet digital (Theodora, 2024).

Berdasarkan data di atas, fenomena sosial mengenai praktik politik uang (*money politics*) menjelang pemilu masih menjadi persoalan utama dari masa ke masa. Tindakan politik uang sendiri dapat mengancam integritas demokrasi di Indonesia. Menurut Simamora dkk. (2025, hlm. 372) politik uang adalah praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka saat Pemilu berlangsung. Politik uang (*money politics*) juga mengacu pada praktik pemberian imbalan tertentu untuk mempengaruhi pihak terkait serta membeli suara agar mendukung calon tertentu (Salman dkk., 2025, hlm. 464). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah pemberian uang atau barang yang ditujukan untuk mempengaruhi proses pemilu.

Salah satu upaya KPU dalam hal mengedukasi masyarakat tentang bagaimana demokrasi yang sehat adalah dengan cara memanfaatkan media massa. Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, media massa dapat membentuk opini, pandangan publik serta membangun stigma di masyarakat. Selain itu, penggunaan media massa juga dapat memudahkan informasi untuk diterima dan dipahami masyarakat dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Febriana (2024, hlm. 13351) bahwa media massa baik itu media cetak, elektronik atau digital memegang peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial dan politik.

Film merupakan salah satu media massa elektronik yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan melalui karya audiovisual. Menurut Ariska & Irhamdhika (2024, hlm. 9) film dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu sebagai karya yang memiliki unsur keindahan tinggi dan sebagai media yang menyampaikan pesan secara luas kepada

penonton. Sementara itu, Pamungkas & Zamzamy (2023, hlm. 1525) menegaskan bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mampu merepresentasikan kondisi masyarakat serta dinamika sosial yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa film memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana hiburan dan media komunikasi yang mampu merefleksikan realitas sosial serta menginspirasi perubahan dalam masyarakat.

Dalam rangka menyambut Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, KPU merilis sebuah film drama komedi dengan judul *Tepatilah Janji* yang disutradarai oleh Garin Nugroho. Beliau adalah seorang seniman yang sering mengeksplorasi tema tentang sosial dan politik dengan gaya sinematiknya yang unik. Film *Tepatilah Janji* secara resmi dipublikasikan pada tanggal 26 November 2024 melalui channel YouTube KPU RI (Nugroho, 2024). Film ini merupakan sekuel dari film *Kejarlah Janji* yang tayang pada tahun 2023. Film *Tepatilah Janji* merupakan bentuk upaya dari KPU dalam memanfaatkan film sebagai media edukasi politik. Sehingga dengan adanya film ini, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika politik, terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Film *Tepatilah Janji* dibawakan dengan humor namun terselip satir di dalamnya. Film ini berawal dari Adam yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa maju kembali untuk mencalonkan diri sebagai Bupati. Bu Rahayu sebagai lawan dalam pemilihan melakukan berbagai cara untuk memenangkan Pilkada. Isu-isu politik seperti politik uang, politik dinasti, lompat jabatan, para pengusaha licik dan kecurangan politikus serta warga desa yang diming-imingi janji manis di representasikan dengan epik dalam film *Tepatilah Janji* ini. Menurut Pradana (2024) keputusan politik di tingkat desa dinilai sangat memengaruhi dinamika politik di tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, edukasi politik

sejak dini sangat diperlukan untuk membentuk pondasi yang kuat agar melahirkan masyarakat sipil yang sehat dan kritis.

YouTube dipilih oleh KPU sebagai platform publikasi film *Tepatilah Janji* dikarenakan memiliki jangkauan yang luas dan mudah untuk diakses masyarakat. Prayoga dkk. (2025, hlm. 70) YouTube menjadi salah satu platform utama dalam berbagai jenis konten, termasuk konten politik yang dengan mudah diakses dan disebarluaskan oleh pengguna. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan isu praktik politik uang yang diangkat dalam film *Tepatilah Janji*, film ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi menjadi media representasi fenomena sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, film *Tepatilah Janji* dapat dikaji melalui perspektif sosiologi sastra yang mempelajari hubungan antara karya sastra dan sosial. Wijaya dkk. (2025, hlm. 23) mendefinisikan sosiologi sastra sebagai ilmu yang mengkaji bagaimana dalam suatu karya sastra dapat mencerminkan norma, nilai dan konflik sosial yang ada dalam masyarakat sehingga berfungsi sebagai cermin realitas sosial. Sementara itu, Sejati & Mukhzamilah (2025, hlm. 496) berpendapat bahwa sosiologi sastra adalah cabang ilmu sosiologi yang mengaplikasikan metode ilmiah dan analisis sosial untuk mempelajari hubungan timbal balik antara sastra dan kehidupan sosial masyarakat.

Fenomena praktik politik uang merupakan bentuk tindakan penyimpangan sosial dalam memperebutkan kekuasaan. Sehingga perspektif sosiologi sastra Pierre Bourdieu dinilai sesuai untuk mengkaji bentuk praktik politik uang dalam film *Tepatilah Janji*. Dinna & Ahmadi (2026, hlm. 11) menyebutkan pandangan Bourdieu yang melihat karya sastra sebagai produk budaya. Dalam hal ini, praktik politik uang merupakan bentuk dari

praktik sosial yang terdiri atas konsep dasar utama, yaitu habitus, modal dan ranah. Zaid dkk. (2025, hlm. 615–616) merumuskan kerangka praktik sosial menurut Pierre Bourdieu seperti [(Habitus) (Modal)] + Arena = Praktik. Habitus merupakan kebiasaan atau pola pikir yang terbentuk dalam masyarakat, sementara modal adalah sumber daya yang digunakan individu untuk mencapai tujuan tertentu seperti modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Ranah merupakan arena atau ruang sosial bagi individu berinteraksi dan memperebutkan kekuasaan.

Di sisi lain, pembelajaran dalam dunia pendidikan menjadi hal terpenting karena menjadi sarana utama untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik. Menurut Rahma dkk. (2024, hlm. 153) pembelajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Dalam hal ini, proses pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mendorong keterlibatan aktif peserta didik baik secara fisik maupun mental. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan perlu adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya mengutamakan aspek kognitif, tetapi juga melibatkan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar yang dicapai.

Pada masa sekarang, Indonesia telah menerapkan kurikulum di mana guru memiliki kebebasan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib di berbagai jenjang sekolah. Menurut Iqbal & Zulfianita (2024, hlm. 3) pembelajaran bahasa, terutama bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya mengembangkan keterampilan komunikasi tetapi juga dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Bahasa

menjadi sarana utama bagi manusia untuk mempelajari berbagai macam bidang ilmu di dunia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan temuan fakta ketika melakukan kajian pustaka, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah belum berjalan secara efektif dikarenakan materi dengan teks yang panjang membuat peserta didik malas membaca dan cepat merasa bosan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Aliya dkk. (2023, hlm. 350) yang mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia sering kali dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami karena panjangnya teks yang digunakan, sehingga menimbulkan rasa enggan pada peserta didik untuk membaca. Fakta tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, efektif dan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperhatikan penggunaan bahan ajar dan media pembelajaran yang digunakan. Salah satu bentuk bahan ajar kontekstual yang dapat digunakan sebagai media penunjang pembelajaran adalah dengan memanfaatkan karya sastra.

Dalam hal ini, film *Tepatilah Janji* yang berisi tentang representasi fenomena yang berasal dari realitas sosial seperti politik uang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran teks Bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan nada satir yang dibalut dengan humor menjadi ciri khas film ini dalam menyampaikan pesan edukasi politik kepada masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula. Fakta temuan lapangan pada penelitian yang dilakukan oleh Mayrudin dkk. (2025, hlm. 94) menegaskan bahwa banyak dari para pemilih pemula terutama siswa SMA sederajat masih cenderung minim literasi politik atau pendidikan politik dalam berpartisipasi politik kepemiluan. Senada

dengan hal tersebut, ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak tergoda dengan praktik politik uang pada Pilkada serentak yang akan diselenggarakan, khususnya para pemilih muda dan generasi Z (Pratama, 2024).

Merujuk pada permasalahan di atas, pemanfaatan film *Tepatilah Janji* dinilai relevan untuk dijadikan sebagai bahan ajar kontekstual peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan buku Bahasa Indonesia Kelas X Edisi Revisi yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat pembelajaran teks yang sesuai dengan pemanfaatan film *Tepatilah Janji* tersebut. Pada Bab II terdapat pembelajaran teks anekdot, yaitu jenis teks yang digunakan sebagai media kritikan tentang fenomena atau fakta yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Dalam pembelajaran ini, juga terdapat tujuan pembelajaran menyampaikan kritikan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang umum digunakan masyarakat (Aulia dkk., 2023, hlm. 55). Pada pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami ciri kebahasaan dalam teks anekdot seperti pertanyaan retorik, majas sindiran dan kata kerja material.

Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktik Politik Uang dalam Film *Tepatilah Janji* (2024) Perspektif Sosiologi Sastra serta Relevansinya dengan Pembelajaran Teks Anekdot Kelas X”. Adapun batasan dalam penelitian yang dilakukan meliputi penelitian yang hanya berfokus pada analisis gambar dan dialog pada adegan yang menunjukkan praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji* dalam perspektif sosiologi sastra Pierre Bourdieu. Selain itu, hasil analisis tersebut juga direlevansikan dengan pembelajaran teks anekdot kelas X terutama pada kegiatan pembelajaran kaidah keahasaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji* dalam perspektif sosiologi sastra?
2. Bagaimana relevansi praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji* dengan pembelajaran teks anekdot kelas X?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji* (2024) dalam perspektif sosiologi sastra.
2. Untuk mengetahui relevansi praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji* (2024) dengan pembelajaran teks anekdot kelas X.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan baru mengenai praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji* (2024) dalam perspektif sosiologi sastra dan relevansinya dengan pembelajaran teks anekdot kelas X. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi informasi sebagai dasar pijakan untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji* (2024) dalam perspektif sosiologi

sastra serta relevansinya dengan pembelajaran teks anekdot kelas X yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan kegiatan pembelajaran yang monoton.

- b. Bagi guru: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar kontekstual guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks anekdot sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
- c. Bagi siswa: pemilihan bahan ajar dengan sesuatu yang baru diharapkan dapat memantik minat belajar peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkesinambungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Muhammad Rofi Akbar Utomo (2025) yang berjudul *Makna Politik Dinasti dalam Film “Tepatilah Janji” (Analisis Semiotika Roland Barthes tentang Makna Politik Dinasti dalam Film “Tepatilah Janji”)*. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada makna politik dinasti dalam film *Tepatilah Janji*. Analisis makna dinasti politik dalam penelitian ini menggunakan semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan keluarga, citra kesalehan dan retorika janji menjadi simbol-simbol yang merepresentasikan kekuasaan. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada objek dan pendekatan dalam penelitian, yaitu film *Tepatilah Janji* dan pendekatan kualitatif. Sementara perbedaannya meliputi fokus penelitian yang berfokus pada praktik politik uang serta teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori

sosiologi sastra. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan juga dikaitkan dengan pembelajaran teks anekdot kelas X.

2. Skripsi Fatimah Faza Nur Ranni (2025) yang berjudul *Representasi Pesan Moral dalam Film Kejarlah Janji dan Film Tepatilah Janji Karya KPU (Analisis Semiotika Roland Barthes)*. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada representasi pesan moral dalam film *Kejarlah Janji* dan film *Tepatilah Janji*. Untuk menganalisis pesan moral, penelitian ini menggunakan teori representasi dan semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film dapat digunakan sebagai media edukasi politik. Dalam kedua film ini, diperoleh pesan moral bahwa tanggung jawab, integritas dan kesadaran politik pada pemimpin serta rakyat dapat menghasilkan demokrasi yang sehat. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada objek dan pendekatan dalam penelitian, yaitu film *Tepatilah Janji* dan pendekatan kualitatif. Sementara perbedaannya meliputi fokus penelitian yang berfokus pada praktik politik uang serta teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori sosiologi sastra. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan juga dikaitkan dengan pembelajaran teks anekdot kelas X.
3. Artikel jurnal Yeremia Charla, Aslan Abidin dan Ridwan (2026) yang berjudul *Habitus, Ranah, dan Modal dalam Novel Jemput Terbawa Karya Pinto Anugrah Perspektif Pierre Bourdieu*. Penelitian kualitatif dan teori sosiologi sastra Pierre Bourdieu digunakan dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk habitus, ranah dan modal kehidupan tokoh pada novel *Jemput Terbawa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh mempunyai habitus, ranah dan modal yang berbeda akibat pengaruh dari pola pikir, kebiasaan dan tindakan ketika

berada di lingkungan sosial. Tokoh Kalaya memiliki habitus, latar belakang dan trauma masa lalu yang tidak sesuai dengan norma di dalam ranah Lembah Pagadih. Hal ini mengakibatkan adanya penolakan sosial dan sulit untuk mendapatkan pengakuan dari warga kampung. Adapun persamaan terletak pada pendekatan penelitian kualitatif dan teori sosiologi sastra Pierre Bourdieu yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara perbedaannya meliputi film *Tepatilah Janji* sebagai objek penelitian dan fokus penelitian pada praktik politik uang dalam film tersebut. Adapun pembaruan dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengaitkan hasil analisis praktik politik uang dalam film dengan pembelajaran teks anekdot kelas X

4. Artikel jurnal Oschar Ebenheazer Laumalay, Rizki Amalia Yanuartha dan Royke Roberth Siahainenia (2025) yang berjudul *Normalisasi Money Politic dan Habitus Digital Generasi Z di Akun TikTok Andik Nur Prabowo dalam Pemilu Indonesia 2024*. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada analisis wacana politik uang (money politics) pada akun TikTok Andik Nur Prabowo. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. Van Dijk dan teori habitus Pierre Bourdieu dalam menganalisis wacana politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten tentang politik uang dianggap wajar bagi generasi Z dan menjadikan media sosial seperti TikTok sebagai tempat praktik tersebut. Adapun persamaan terletak pada pendekatan kualitatif, fokus penelitian tentang praktik politik uang dan teori sosiologi sastra Pierre Bourdieu yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara perbedaannya meliputi film *Tepatilah Janji* sebagai objek penelitian. Adapun pembaruan dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengaitkan hasil analisis praktik politik uang dalam film dengan pembelajaran teks anekdot kelas X.

5. Artikel jurnal Fitro Nur Hakim (2025) yang berjudul *Sosiologi Bourdieu Melihat Poster Film Horor Indonesia*. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada analisis desain, makna sosia dan budaya dalam poster film horor Indonesia perspektif Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poster bukan hany sebagai media promosi, akan tetapi dapat mereproduksi budaya serta kepercayaan lokal. Selain itu, penggunaan visual horor dapat mencerminkan habitus masyarakat tentang stereotip dunia gaib. Adapun persamaan terletak pada pendekatan kualitatif dan teori sosiologi sastra Pierre Bourdieu yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara perbedaannya meliputi film *Tepatilah Janji* sebagai objek penelitian dan praktik politik uang dalam film menjadi fokus penelitian. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan juga dikaitkan dengan pembelajaran teks anekdot kelas X.
6. Artikel jurnal Daniel Gelegar Pamungkas dan Ahmad Zamzamy (2023) yang berjudul *Representasi Politik Uang dalam Film Lansia Lan Sopo (Analisis Semiotika John Fiske)*. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan befokus pada representasi politik uang dalam film Lansia Lan Sopo menurut teori semiotika John Fiske. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini dapat merepresentasikan praktik politik uang pada saat pemilihan kepala desa baik dari level realitas, representasi dan ideologi. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus dan pendekatan dalam penelitian, yaitu praktik politik uang dan pendekatan kualitatif. Sementara perbedaanya meliputi objek penelitian serta teori yang digunakan untuk menganalisis adalah film *Tepatilah Janji* dan teori sosiologi sastra. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan juga dikaitkan dengan pembelajaran teks anekdot kelas X.

7. Artikel jurnal Dede Susanti (2023) yang berjudul *Analisis Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Anekdote dalam Buku “Koleksi Humor Gus Dur Paling Nyeleneh” Karya Guntur Wiguna serta Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar di SMA*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui teks anekdot dalam buku *Koleksi Humor Gus Dur Paling Nyeleneh* dapat atau tidak untuk dijadikan alternatif bahan ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks anekdot dalam buku ini mengandung struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas X sehingga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau alternatif bahan ajar. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan memanfaatkan media pada pembelajaran teks anekdot. Sementara perbedaannya meliputi fokus penelitian yang berfokus pada praktik politik uang dalam film serta teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori sosiologi sastra.

## **F. Kajian Teoritis**

### **1. Politik Uang**

#### **a. Pengertian Politik Uang**

Secara umum, politik uang adalah bentuk upaya mempengaruhi seseorang dengan imbalan tertentu. Politik uang sendiri merupakan tindakan berupa pemberian uang atau barang kepada pemilih sebagai bentuk sogokan dengan tujuan memengaruhi pilihan pada saat pemilihan. Sementara itu, Sugiharto (2021, pp. 17–18) dalam bukunya yang berjudul *Politik Uang dan Permasalahan Penegak Hukumnya* mendefinisikan politik uang sebagai tindakan membagi-bagikan uang, barang atau janji-janji kepada masa (*voters*) secara sadar yang dilakukan oleh

pelaku untuk memperoleh keuntungan politis. Ahmad (2015, hlm. 2–3) dalam bukunya yang berjudul *Pilar Demokrasi Kelima* menjelaskan bahwa para calon kepala daerah biasanya melakukan praktik politik uang dengan dua cara, yaitu membeli suara dari pemilih dengan memberikan sejumlah uang dan memanfaatkan politik uang untuk memengaruhi berbagai celah kebijakan dalam proses Pemilu.

Bentuk politik uang (*money politic*) pada waktu kampanye Pemilu tidak hanya dalam bentuk uang, akan tetapi juga dapat berupa material lainnya seperti sembako, bahan bangunan, akses untuk proyek-proyek pembangunan pemerintah dan jabatan-jabatan birokrat. Selain itu praktik politik uang sendiri tidak hanya dilakukan oleh para kandidat saja, tetapi juga dilaksanakan oleh para pendukung atau pihak lain yang ingin menguasai hasil Pemilu secara ilegal.

#### **b. Bentuk-bentuk Politik Uang**

Adapun bentuk-bentuk politik uang yang kerap ditemui pada saat Pemilu menurut Sugiarti (2023, hlm. 40–43) dalam bukunya yang berjudul *Money Politic* sebagai berikut:

##### **(1) Pembelian Suara (*Vote Buying*)**

Bentuk dari politik uang yang marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah jual-beli suara. Dalam hal ini, pemberi (kandidat atau tim sukses) memberikan materi berupa uang atau barang kepada setiap individu yang mempunyai hak pilih untuk memberikan suaranya kepada pemberi saat Pemilu berlangsung. Praktik politik uang ini biasanya terdapat transaksi langsung (uang/barang = pilih kandidat) yang dilakukan pada masa kampanye atau beberapa hari sebelum pemungutan suara.

**(2) Pemberian-pemberian Pibadi (*Individual Gifts*)**

Bentuk politik uang lainnya adalah memberikan hadiah atau bantuan yang dilakukan oleh kandidat secara langsung atau diwakilkan tim suksesnya kepada pemilih sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dan membangun kedekatan. Praktik ini umumnya dilakukan ketika kampanye berlangsung atau kunjungan ke rumah-rumah warga. Pemberian ini disebut sebagai bentuk mempererat hubungan sosial antara kandidat dan pemilih yang bersifat personal.

**(3) Pelayanan dan Aktivitas (*Services and Activities*)**

Bentuk politik uang selanjutnya adalah berupa berbagai layanan masyarakat dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kandidat untuk menarik perhatian pemilih agar memberikan dukungannya. Contoh dari layanan sosial yang diberikan adalah cek kesehatan gratis, penyediaan ambulans dan pelayanan sosial lainnya. Sementara kegiatan yang sering dilakukan adalah membuat acara yang ditujukan untuk melaksanakan kampanye seperti pertandingan olahraga, pengajian dan lain sebagainya.

**(4) Barang-barang Kelompok (*Club Goods*)**

Bentuk praktik politik uang ini khusus ditujukan kepada kelompok atau komunitas sosial baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Dalam hal ini, kandidat melakukan kunjungan dan memberikan donasi berupa barang atau keuntungan yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut. Contoh politik uang seperti ini meliputi perlengkapan ibadah, peralatan pertanian, peralatan olahraga, sound system dan lain sebagainya.

### **(5) Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel Projects*)**

Bentuk politik uang ini sedikit berbeda dengan yang sudah dijelaskan di atas. Pada umumnya para kandidat menggunakan bentuk politik uang ini dengan cara menawarkan proyek-proyek pembangunan di wilayah tertentu. Dalam hal ini, proyek tersebut ditujukan untuk masyarakat dan dibiayai dengan dana masyarakat. Para kandidat di sini menaruh harapan kepada masyarakat agar memberikan suara atau dukungan politik kepadanya.

### **(6) Berbentuk Janji-janji**

Bentuk politik uang yang juga sering dilakukan oleh kandidat pada masa pemilihan adalah memberikan janji-janji tertentu kepada masyarakat. Para kandidat biasanya memberikan janji berupa bantuan atau tawaran keuntungan kepada pemilih jika kandidat tersebut terpilih dalam pemilihan. Hal ini disebut dengan sistem pertukaran sosial di mana setiap bentuk pemberian harus ada balasan atau imbalan sebagai hubungan timbal balik.

## **c. Faktor-faktor Terjadinya Politik Uang**

Fenomena politik uang yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang menurut Amal (2022, hlm. 411–413) sebagai berikut:

### **(1) Faktor Lemahnya Pengawasan**

Lemahnya pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya politik uang yang sulit terungkap. Hal ini disebabkan karena Bawaslu sering kali mengalami kendala kekurangan bukti yang cukup untuk mengungkap kasus pelanggaran tersebut.

## **(2) Faktor Ekonomi**

Penyebab maraknya politik uang yang kedua adalah ekonomi dan kemiskinan. Para kaum elite atau kandidat yang memiliki finansial bagus akan cenderung memanfaatkan masyarakat dengan ekonomi rendah atau miskin untuk melakukan jual-beli suara. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari masyarakat tersebut lebih memilih material untuk bertahan hidup daripada memikirkan politik di masa depan.

## **(3) Faktor Pendidikan**

Selain faktor ekonomi, politik uang juga dapat terjadi dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi celah bagi kaum elite untuk melakukan praktik politik uang. Bagi masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman yang kurang terkait politik akan menganggap bahwa politik uang itu adalah hal yang lumrah. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang mudah menerima sejumlah imbalan material dari para kandidat.

## **(4) Faktor Budaya**

Penyebab terjadinya politik uang yang terakhir adalah faktor budaya. Munculnya praktik politik uang di desa-desa terjadi akibat dari budaya patrimonialisme dan hubungan patron-klien. Hal ini di mana dalam sebuah daerah atau desa terdapat tokoh kuat (*local strongmen*) yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat, sekalipun dalam Pemilu. Dengan demikian, para kandidat biasanya akan memberikan bantuan atau uang kepada tokoh-tokoh ini untuk disalurkan kepada masyarakat.

#### **d. Dampak-dampak Politik Uang**

Politik uang merupakan ancaman terbesar bagi terciptanya demokrasi yang sehat. Praktik ini dinilai telah merusak dari nilai-nilai yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, partisipasi warga yang aktif dan kesetaraan hak dalam memilih. Adapun beberapa dampak dari politik uang menurut Densi & Delarue (2026, pp. 22–26) dalam bukunya yang berjudul *Politik Uang (Model Strategi Pencegahan dan Penanganan Peanggaran)* sebagai berikut:

##### **(1) Mengurangi Kualitas Pemilihan**

Praktik politik uang dapat memengaruhi pemilih untuk cenderung memilih berdasarkan keuntungan yang diperoleh daripada memilih berdasarkan kualitas dan program yang ditawarkan oleh kandidat. Hal ini mengakibatkan rusaknya substansi demokrasi di mana keputusan pemilihan politik tidak didasarkan pada kepentingan jangka panjang untuk negara, melainkan pada keputusan sesaat yang mementingkan keuntungan individu.

##### **(2) Menciptakan Ketidaksetaraan dalam Proses Pemilihan**

Setiap individu yang memiliki hak pilih mempunyai hak yang sama dalam Pemilu. Hal ini merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi. Namun, dengan adanya politik uang dapat menyebabkan ketidaksetaraan karena kandidat yang memiliki sumbu daya finansial lebih banyak dapat membeli suara pemilih dengan memberikan uang atau barang. Sedangkan kandidat yang memiliki finansial terbatas cenderung berfokus pada ide atau visinya untuk memenangkan pemilihan. Dengan demikian, secara tidak langsung hal ini memberikan keuntungan bagi pihak kandidat yang kaya atau lebih berkuasa dari segi finansial.

### **(3) Melemahkan Partisipasi Pemilih**

Politik uang juga berdampak pada partisipasi masyarakat karena para pemilih yang menerima uang atau barang dari pelaku sering kali memilih secara apatis tanpa memahami perannya dalam membentuk masa depan negara. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat keaktifan pemilih dalam partisipasinya untuk menentukan arah kebijakan negara. Dalam hal ini juga para pemilih yang menganggap bahwa suara mereka dapat dibeli cenderung merasa tidak memiliki tanggung jawab moral atau sosial dalam bernegara.

### **(4) Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan**

Praktik politik uang selama proses pemilihan adalah gerbang menuju korupsi di mana kandidat yang terpilih dari hasil kecurangan ini memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Hal ini menjadi pembuka dari tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan kepada rakyat. Praktik ini juga menciptakan pemerintahan yang tidak transparan dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

### **(5) Mengikis Kepercayaan terhadap Sistem Demokrasi**

Politik uang yang sudah menjadi hal umum di masyarakat mengakibatkan terkikisnya rasa kepercayaan itu terhadap sistem demokrasi di Indonesia ini. Selain itu, dengan adanya praktik politik uang yang sudah dianggap wajar ini dapat memperburuk citra politik di mata masyarakat, mengarah pada apatisisme politik serta dapat meningkatkan skeptisisme suara individu dalam menentukan hasil Pemilu.

### **(6) Merusak Fungsi Partai Politik**

Politik uang juga berdampak pada rusaknya fungsi dan peran dari partai politik. Partai politik yang melakukan politik uang dalam Pemilu cenderung tidak mementingkan program kerja untuk kepentingan rakyat. Partai politik akan lebih berfokus pada bagaimana cara memenangkan Pemilu dengan segala cara.

### **(7) Meningkatkan Ketidakstabilan Politik**

Politik uang juga berdampak pada kestabilan politik karena dapat menciptakan pemerintahan yang tidak solid dan mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi ataupun kelompok. Pemerintahan akan cenderung lemah, serta meningkatkan ketegangan di publik dan menyebabkan konflik politik yang lebih besar.

## **2. Film**

### **a. Pengertian Film**

Film biasa disebut dengan sinema yang berarti gambar bergerak. Selain itu, film juga salah satu bentuk karya sastra audiovisual yang populer. Hal ini diperkuat dengan pendapat Waliulu dkk. (2024, hlm. 6) dalam bukunya yang berjudul *TV dan Film* menjelaskan bahwa film memiliki pengaruh yang besar daripada media lain. Dalam film terdapat penggabungan antara audio dan visual serta penyampaian yang kreatif sehingga dapat lebih mudah menarik perhatian penonton.

Menurut Alfathoni & Manesah (2020, hlm. 29) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Teori Film* menyatakan bahwa film dapat dianalisis melalui berbagai perspektif keilmuan. Salah satunya film dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai bentuk representasi realitas sosial yang terkandung di dalamnya. Pada umumnya, bentuk representasi ini terlihat dari setiap adegan, dialog maupun karakter para

tokoh yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik atau nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, fungsi dari pembuatan film tidak hanya sebagai hiburan, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai media untuk mempengaruhi masyarakat dalam hal berpikir, bersikap dan bertindak di kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, film *Tepatilah Janji* termasuk ke dalam jenis film fiksi. Pratista (2024, hlm. 15) dalam bukunya yang berjudul *Memahami Film: Pengantar Naratif* mendefinisikan film fiksi sebagai film yang sengaja dibuat atau rekaan cerita dengan konsep pengadeganan yang telah dirancang serta terikat oleh plot. Pada umumnya, cerita pada film fiksi memiliki karakter tokoh antagonis dan protagoni, konflik dan pengembangan alur yang jelas. Selain itu, film fiksi juga dapat dikatakan berada di tengah-tengah antara dua jenis film di atas, yaitu nyata dan abstrak. Namun, tidak jarang juga banyak film fiksi yang lebih condong ke salah satunya.

## b. Identitas Film *Tepatilah Janji*

**Gambar 1. 1** Poster Film *Tepatilah Janji* (2024)



(Sumber: Akun Instagram @filmtepatilahjanji (2024))

Judul Film : Tepatilah Janji  
 Durasi : 106 Menit (1 Jam 46 Menit)  
 Sutradara : Garin Nugroho  
 Produser Eksekutif : Ketua KPU RI  
 Mochammad Afifuddin

Anggota KPU RI

1. August Mellaz
2. Betty Epsilon Idroos
3. Idham Holik
4. Yulianto Sudrajat
5. Parsadaan Harahap

Sekretaris Jenderal

Bernad Dermawan Sutrisno

Produser : 1. Rina Damayanti  
 2. Marlia Nurdiyani  
 3. Susi Roselia

Pengarah Sinematografi : Joseph Christoforus Fofid

Desain Produksi : Ong Hari Wahyu

Pengarah Artistik : Hastagus Ekayana

Penulis Skenario : 1. Alim Sudio  
 2. Tim Tulis Amarta  
 3. Ricky Zakaria Fajri

Penata Busana : Retno Ratih Damayanti

Penata Rias : Darto “Unge”

Penyunting Gambar : Beck

Perekam Suara : Krisna Purna

Penata Musik : Charlie Meliala

Penata Suara : Mangkils Hasan

Penata Peran : 1. Ibnu Widodo, A. C. I  
 2. Rudiomo, A. C. I

- Line Produser : 1. Syahril Lubs  
2. Emmanuel Seta Wijaya
- Pemain : 1. Cut Mini sebagai Bu Pertiwi  
2. Ibnu Jamil sebagai Pak Janji Upaya  
3. Bima Zeno sebagai Adam  
4. Shenina Cinnamon sebagai Sekar  
5. Kevin Abani sebagai Isham  
6. Givina sebagai Lala  
7. Faradina Mufti sebagai Tari  
8. Whani Dharmawan sebagai Pak Widodo  
9. Siti Fauziah sebagai Bu Rahayu  
10. Triyanto Hapsoro sebagai Pak Budi  
Wiraguna  
11. Achi, Tere dan Vista sebagai Trio Timus  
12. Gepeng Kesana Kesini, Koes dan Daniel  
sebagai Trio Tikus  
13. Udik S sebagai Eka  
14. Seteng Sadjja sebagai Ramli  
15. Noel Kefas sebagai Wakil Adam  
16. Axel sebagai Wakil Bu Rahayu  
17. Mirkoen sebagai Karto  
18. Yu Beruk sebagai Yu Ningsih

Film *Tepatilah Janji* merupakan hasil produksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Asta Jaya Centra Cinema yang berkolaborasi dengan Padi Padi Creative dan Garin Workshop. Film ini hadir sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Film *Tepatilah Janji* tayang perdana pada Jumat malam, 9 Agustus 2024 di Epicentrum XXI Karet Kuningan, Jakarta Selatan (Laraswaty, 2024).

Film ini memperlihatkan bagaimana proses pendaftaran, kampanye dan pemungutan suara dalam Pilkada. Tepatilah Janji menyuguhkan kompetisi antar caleg, tingkah laku politikus dan kompleksitas politik tanpa etika. Bu Rahayu sebagai lawan Adam melakukan modus-modus politik seperti politik uang pada saat kampanye berlangsung. Ia memanfaatkan berbagai modal serta koneksi relasinya untuk memenangkan Pilkada. Dalam film ini juga menyuguhkan bagaimana respons dari rakyat ketika dihadapkan dalam polemik politik yang semakin bergejolak saat mendekati hari pemungutan suara (Andaresta, 2024).

### **3. Sosiologi Sastra**

#### **a. Pengertian Sosiologi Sastra**

Menurut Hawa (2022, hlm. 14) dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Sastra* menyatakan bahwa sosiologi sastra menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat perhatian, sementara karya sastra berfungsi sebagai cerminan sekaligus objek kajian terhadap realitas sosial tersebut. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi sastra berperan penting dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kehidupan manusia dengan lingkungan sosialnya.

Menurut R. Wellek & A. Warren (1949) dalam buku *Sosiologi Sastra* karya Husen (2008, hlm. 10) karya sastra dipandang sebagai bahasa unsur sosial. Hal ini berarti bahwa karya sastra termasuk film lahir dari cerminan kehidupan sosial dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masa tertentu. Sementara itu, menurut Wellek & Warren (1956) dalam buku *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra* karya Damono (2002, hlm. 3–4) kajian sosiologi sastra dibagi menjadi tiga aspek, yaitu sosiologi pengarang yang mempelajari konteks sosial, ideologi, pendidikan dan pandangan hidup pengarang baik secara individu maupun sebagai bagian dari sistem sosial

tertentu. Selanjutnya sosiologi karya sastra yang berfokus pada isi serta tujuan dari karya di mana karya tersebut mencerminkan atau menanggapi kondisi sosial budaya masyarakat tertentu. Terakhir, yaitu sosiologi pembaca yang mengkaji bagaimana karya sastra diterima dan memengaruhi pembaca dengan berbagai latar belakang.

Di sisi lain, sosiologi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada kajian objektif antara individu dan masyarakat, lembaga-lembaga sosial serta poses-proses sosial yang terjadi di dalamnya. Sementara itu, sastra juga sering menampilkan kehidupan masyarakat, bagaimana adaptasi manusia dengan lingkungannya serta usaha manusia untuk melakukan perubahan dalam kehidupannya. Dengan demikian, kajian sosiologi sastra merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti korelasi antara karya sastra dengan masyarakat.

#### **b. Sosiologi Sastra Pierre Bourdieu**

Manarfa dkk. (2024, hlm. 149) dalam bukunya yang berjudul *Teori Sosiologi* menjelaskan bahwa Pierre Bourdieu adalah sosiolog asal Perancis yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1930. Beliau adalah tokoh dunia yang banyak sekali memberikan kontribusi dalam menjelaskan terkait kekuasaan, struktur sosial, kelas sosial dan lingkungan sosial. Dalam buku karya Karnanta (2018, hlm. 21–22) dijelaskan bahwa dalam konteks kajian sastra, Bourdieu melihat karya sastra sebagai produk yang tercipta berdasarkan struktur sosial tertentu bukan hanya hasil dari karya pengarang. Oleh karena itu, teori sosiologi sastra Pierre Bourdieu disebut dengan strukturalisme konstruktivis, yaitu cara realitas sosial yang dilihat dari dua sisi.

Strukturalisme adalah pola-pola hubungan sosial di mana dalam suatu masyarakat biasanya sudah terdapat struktur atau sistem (norma, aturan dan kekuasaan) yang dapat mempengaruhi serta membatasi tindakan individu.

Sementara konstruktivisme adalah cara persepsi, cara berpikir dan kebiasaan setiap individu yang terbentuk dari pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, praktik sosial dalam karya sastra terbentuk dari hubungan kebiasaan individu dan lingkungan sosialnya.

Udayana dkk. (2021, hlm. 19–34) dalam bukunya yang berjudul *Sastra Sebagai Praktik Sosial* menjelaskan konsep dari sosiologi sastra menurut Pierre Bourdieu. Adapun penjelasan dari pandangan utama tersebut adalah sebagai berikut:

### **(1) Habitus**

Habitus adalah kebiasaan atau sistem disposisi yang tanpa disadari sudah tertanam dalam setiap individu sehingga dapat mempengaruhi tindakan serta cara berpikirnya. Bourdieu (1997, hlm. 72) dalam bukunya yang berjudul *Outline of a Theory of Practice* menyebutkan bahwa habitus dipahami sebagai pola atau dasar yang menciptakan praktik-praktik sosial dengan konsisten, namun tetap fleksibel atau dapat menyesuaikan dengan situasi-situasi yang berbeda. Habitus sendiri juga tidak langsung muncul dalam diri manusia, ada beberapa faktor lain yang dapat memengaruhinya seperti budaya, lingkungan sosial, latar belakang keluarga dan pendidikan dari setiap individu. Contohnya seperti seorang anak yang tumbuh di keluarga pekerja kasar mungkin akan memiliki habitus yang berbeda dari anak yang tumbuh di keluarga kelas atas. Sehingga gaya hidup, preferensi dan nilai-nilai dari mereka juga akan berbeda.

### **(2) Modal (*Capital*)**

Modal adalah sumber daya atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk menentukan posisinya dalam masyarakat. Konsep modal (*capital*) adalah cara Bourdieu dalam memetakan kekuasaan di lingkup masyarakat. Di mana orang

yang memiliki modal atau sumber daya besar dan beragam seperti ekonomi, sosial atau budaya posisinya dalam masyarakat akan tinggi. Hal ini dikarenakan semakin besar modal yang dimiliki individu akan semakin besar peluangnya untuk menguasai seseorang atau kelompok. Sehingga perbedaan antara setiap individu atau kelompok itu muncul akibat dari perbedaan dalam kepemilikan modal tersebut. Dalam hal ini, buku *Gerak Kuasa* karya Udasmoro (2020, hlm. 298) menjelaskan bahwa Bourdieu membagi modal menjadi empat jenis, yaitu:

**(a) Modal Ekonomi**

Modal ekonomi adalah sumber daya dengan berbagai bentuk yang bersifat material seperti kepemilikan uang, kekayaan, aset serta barang yang berfungsi sebagai alat produksi. Dalam praktiknya, modal ekonomi yang dimiliki individu atau kelompok memiliki peran penting dalam membentuk modal-modal lainnya. Hal ini dikarenakan mereka yang memiliki kekuatan finansial lebih akan cenderung bisa mengakses berbagai peluang yang ada. Sebagai contoh ada seseorang dengan kondisi ekonomi yang baik akan mampu mencapai pendidikan lebih tinggi (modal budaya), memperluas relasi sosial dari lingkungan elit (modal sosial), serta memperoleh pengakuan atau kedudukan tertentu di masyarakat (modal simbolik).

**(b) Modal Budaya**

Modal budaya adalah sumber daya yang merujuk pada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu. Modal ini dapat dicapai melalui pendidikan formal maupun informal. Contoh dari pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Sementara pendidikan informal dapat diperoleh dari lingkungan keluarga, kebiasaan sehari-

hari dan pengalaman hidup dari seseorang. Oleh karena itu, modal budaya sangat berperan dalam cara individu berpikir, berbicara dan bertindak di lingkungan masyarakat. Pada umumnya, seseorang yang memiliki modal budaya tinggi akan lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan akademik serta mempunyai peluang besar untuk mendapatkan posisi sosial yang lebih baik.

**(c) Modal Sosial**

Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh individu hasil dari hubungan sosialnya dengan orang lain, baik dari lingkup keluarga, teman, komunitas atau organisasi. Modal ini meliputi jaringan relasi yang berlandaskan kedekatan, kepercayaan, solidaritas dan loyalitas dengan seseorang. Dalam praktiknya, modal sosial memiliki kekuatan berdasarkan seberapa luas dan kuatnya jaringan yang dimiliki setiap individu. Sehingga modal sosial menjadi faktor penting untuk mempermudah individu dalam mencapai tujuan tertentu di kehidupan sosial.

**(d) Modal Simbolik**

Modal simbolik adalah sumber daya yang berbentuk pengakuan, status, kehormatan dan citra yang diberikan masyarakat kepada individu tertentu. Pada umumnya, modal simbolik terbentuk dari beberapa modal yang telah dimiliki seseorang seperti berpendidikan tinggi (modal budaya), mempunyai relasi yang luas (modal sosial) dan kondisi finansial yang baik (modal ekonomi). Sehingga orang yang memiliki modal simbolik akan cenderung lebih mudah dihormati, dipercaya dan memperoleh pengakuan di lingkungan sosial.

### **(3) Ranah (*Field*)**

Ranah atau biasa disebut dengan arena adalah tempat sosial yang menjadi ruang bagi setiap individu atau kelompok untuk berinteraksi dan berkompetisi agar mendapatkan kekuasaan, pengaruh dan sumber daya. Menurut Bourdieu (2010, hlm. 213) dalam bukunya yang berjudul *Arena Produksi Kultural* mendefinisikan ranah sebagai suatu ruang sosial yang terpisah dan memiliki aturan-aturan sendiri dalam keberfungsian. Selain itu, Bourdieu juga memandang ranah sebagai tempat pertempuran yang merebutkan kekuasaan dan kekuatan. Pertempuran ini dapat berupa mempertahankan atau mengubah susunan kekuasaan.

## **4. Pembelajaran Teks Anekdote**

### **a. Pengertian Teks Anekdote**

Sikumbang (2022, hlm. 15) dalam bukunya yang berjudul *Teks Anekdote* mendefinisikan teks anekdot sebagai karangan cerita atau narasi yang terinspirasi berdasarkan pengalaman hidup seseorang atau pribadi secara singkat, menarik dan lucu dengan beragam topik seperti politik, hukum, sindiran, pendidikan, kritikan. Sementara itu, Susanti (2023, hlm. 65–66) berpendapat bahwa teks anekdot berisi kritikan tentang suatu hal yang sedang ramai terjadi dengan menyelipkan humor di dalamnya. Af'idah & Asmarani (2020, hlm. 24) dalam bukunya yang berjudul *Teks Anekdote* juga menambahkan bahwa anekdot tidak hanya berupa teks, namun juga bisa berbentuk lisan. Salah satu contoh anekdot lisan dapat ditemui dalam seminar, pidato, bahkan dalam ruang pertunjukan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa teks anekdot adalah karangan yang berisi tentang kritikan mengenai suatu hal dengan dikemas dalam balutan humor.

## **b. Ciri-ciri Teks Anekdote**

Tidak semua jenis teks dapat dikatakan sebagai teks anekdot. Adapun ciri-ciri teks anekdot menurut Sutanti (2023, hlm. 18) sebagai berikut:

- (1) Isi teks atau cerita dapat menghibur serta mengundang pembaca atau penonton tertawa.
- (2) Teks dapat digunakan sebagai media penyampaian kritik yang halus agar pembaca atau pendengar tidak merasa tersinggung.
- (3) Teks dapat menjadi alat untuk menyampaikan aspirasi atau pandangan yang positif kepada khalayak ramai.
- (4) Pembaca atau pendengar dapat terinspirasi untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau unjuk rasa terhadap sesuatu hal yang menyimpang dengan cara yang santun.
- (5) Tokoh dalam teks biasanya menunjukkan tokoh-tokoh atau figur penting yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
- (6) Teks bersifat lucu, humoris, menggelitik dan berbaur lelucon namun dapat menyindir.

## **c. Struktur Teks Anekdote**

Dalam sebuah teks, pasti memiliki struktur teks agar membangun alur yang sistematis. Adapun struktur teks anekdot menurut Kosasih (2014, hlm. 5–6) dalam bukunya yang berjudul *Jenis-jenis Teks* membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

**(1) Abstraksi**

Pada bagian ini berisi tentang gambaran awal atau pengantar dalam sebuah teks anekdot. Pada umumnya, bagian abstraksi berada pada awal teks karena memberikan gambaran singkat tentang teks anekdot secara keseluruhan.

**(2) Orientasi**

Pada bagian ini berisi mengenai penjelasan awal dalam teks anekdot. Biasanya bagian orientasi ini harus ada pengenalan tokoh, pengenalan latar dan pengenalan kondisi.

**(3) Krisis**

Pada bagian ini merupakan pokok atau inti dari teks anekdot. Puncak dari masalah biasanya terletak pada bagian ini. Selain itu, pada struktur krisis juga terlihat karakteristik dari teks anekdot, yaitu berupa kritik atau sindiran yang dibalut dalam humor sehingga mengundang pembaca untuk tertawa.

**(4) Reaksi**

Pada bagian ini berisi respon atau tanggapan dari bagian krisis berupa sikap tokoh dalam cerita. Tanggapan atau respon tokoh dapat dilihat dari reaksi yang diperlihatkan seperti mencela, menyetujui, tidak setuju bahkan ikut menertawakan.

**(5) Koda**

Pada bagian ini merupakan akhir dari struktur teks anekdot. Pada umumnya, bagian koda berisi tentang penutup atau kesimpulan yang dibuat oleh penulis.

#### **d. Kaidah Kebahasaan Teks Anekdote**

Pada umumnya, kritikan dapat tersampaikan dengan baik apabila menggunakan bahasa yang tepat. Adapun kaidah kebahasaan teks anekdot menurut Aulia dkk. (2023, hlm. 56–59) dalam bukunya yang berjudul *Bahasa Indonesia* sebagai berikut:

##### **(1) Pertanyaan Retoris**

Pertanyaan retorik merupakan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena sudah jelas. Pertanyaan ini digunakan untuk memberikan sindiran, nasihat, pesan atau dukungan kepada orang lain dengan halus. Dalam hal ini, pertanyaan retorik tidak untuk dijawab, tetapi digunakan untuk memberi penekanan pada perasaan atau ide tertentu.

##### **(2) Majas Sindiran**

Majas sindiran adalah ragam gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau maksud tertentu dengan gaya menyindir. Tujuan dari penggunaan majas sindiran dalam teks anekdot ini sendiri untuk memperkuat kesan dan makna kata kepada pembaca. Dalam hal ini, majas sindiran dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

###### **(a) Ironi**

Ironi merupakan jenis gaya bahasa sindiran yang digunakan untuk menyindir, mengkritik dan mengekspresikan bentuk ketidaksetujuan pada sesuatu hal. Dalam hal ini, sesuatu yang disampaikan merupakan kebalikan dari kondisi sebenarnya. Pada umumnya, ironi diungkapkan dengan bahasa yang tampak halus dan positif, padahal di balik itu mengandung makna sindiran atas kritikan yang diberikan.

**(b) Sinisme**

Sinisme merupakan jenis gaya bahasa sindiran untuk mengutarakan kekecewaan, ketidaksetujuan atau perasaan kesal terhadap orang atau kondisi tertentu secara terang-terangan. Biasanya, sinisme disampaikan dengan kata-kata yang cenderung sedikit tajam, kasar dan menyakitkan tanpa ditutupi dengan diksi yang halus. Sehingga dalam penggunaan majas sinisme ini mengakibatkan kesan yang kurang menyenangkan.

**(c) Sarkasme**

Berbeda dari kedua majas sindiran sebelumnya, sarkasme adalah gaya bahasa yang paling keras, tajam dan pedas diantara ketiganya. Sarkasme digunakan untuk mengkritik, menyinggung dan menyerang seseorang atau kondisi tertentu secara terang-terangan tanpa berusaha untuk memperhalusnya. Selain itu, majas sarkasme juga berfungsi untuk mengungkapkan ketidaksetujuan, perasaan marah atau kecewa terhadap sesuatu hal.

**(3) Kata Kerja Material**

Kata kerja material adalah kata yang merujuk pada suatu kegiatan atau aktivitas. Dalam hal ini, penggunaan kata kerja material dalam teks anekdot berkaitan dengan tindakan dari para tokoh serta alur yang menciptakan serangkaian peristiwa. Susanti (2023, hlm. 67–68) mengemukakan bahwa kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek melakukan sebuah tindakan, kegiatan, perbuatan atau aksi seperti membaca, menulis dan sebagainya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik politik uang dalam film *Tepatilah Janji* serta relevansinya dengan pembelajaran teks anekdot kelas X. Menurut Semi (2012, hlm. 18) penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang untuk memperoleh data dan informasi tentang objek penelitian dilakukan di perpustakaan atau ruang kerja peneliti melalui berbagai sumber seperti buku atau media audiovisual lainnya. Sementara pendekatan kualitatif menurut Ibrahim dkk. (2018, hlm. 21) merupakan pendekatan yang berpusat pada pemahaman serta pencarian makna yang mendalam terkait fokus penelitian sehingga memperoleh data seperti gambar, kata-kata ataupun fenomena alami (*natural setting*). Selain itu, penelitian yang dilakukan juga menggunakan analisis perspektif sosiologi sastra Pierre Bourdieu karena film *Tepatilah Janji* ditempatkan sebagai karya budaya yang merepresentasikan praktik sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menafsirkan praktik politik uang dalam film tersebut dari sudut sosiologi sastra melalui analisis narasi maupun dialog para tokoh dengan bukti gambar yang berhubungan dengan praktik politik uang. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dikaitkan juga dengan pembelajaran teks anekdot kelas X.

### **2. Sumber Data**

Menurut Zafri & Hastuti (2021, hlm. 64–65) sumber data adalah sesuatu yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data penelitian baik melalui observasi, wawancara, dokumen ataupun cara lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Anggito & Setiawan (2018, hlm. 213) bahwa data mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh

melalui observasi di lapangan berupa angka, huruf, grafik atau gambar untuk menghasilkan informasi atau kesimpulan tertentu. Berdasarkan tingkatan sumbernya, sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

**a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber utama/asli. Menurut Attamimi dkk. (2023, hlm. 118) data primer adalah data nyata yang dikumpulkan peneliti secara langsung. Dalam hal ini, narasi atau dialog para tokoh pada adegan praktik politik uang dalam film *Tepatilah Janji* dan buku Bahasa Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi) menjadi sumber data primer dari penelitian yang dilakukan. Adapun unsur-unsur dalam film yang dianalisis meliputi dialog dan narasi para tokoh yang berhubungan dengan praktik politik uang yang ditampilkan.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung. Menurut Attamimi dkk. (2023, hlm. 118) data sekunder didapat peneliti tidak melalui responden secara langsung, akan tetapi diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan ilmiah, laporan kantor atau perusahaan, jurnal penelitian dan sumber lainnya. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder berupa pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian seperti buku, artikel jurnal dan dokumen lainnya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik observasi dan dokumentasi digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data empiris. Teknik tersebut peneliti pilih untuk memastikan bahwa

data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi dan dapat diujikan secara ilmiah. Adapun penjelasan dari kegiatan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Observasi**

Menurut Sudaryono (2016, hlm. 87) observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung untuk memahami permasalahan dalam penelitian. Observasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu observasi parsitipasif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah pengamatan yang di mana peneliti ikut terlibat di dalamnya, sedangkan observasi non-partisipatif adalah pengamatan yang di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini, observasi non-parsitipasif dilakukan di mana peneliti hanya mengamati film *Tepatilah Janji* tanpa terlibat di dalamnya. Peneliti menonton secara berulang untuk memahami dialog, adegan atau narasi tokoh yang menunjukkan praktik politik uang. Selain itu, peneliti juga mengamati buku Bahasa Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi) untuk menjadi acuan dari pembelajaran teks anekdot. Pada tahap ini, peneliti mencatat data-data tersebut untuk dijadikan bahan pengolahan data.

**b. Dokumentasi**

Menurut Sudaryono (2016, hlm. 90) dokumentasi merupakan cara memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter atau lokasi penelitian yang relevan. Dalam hal ini, peneliti mengambil dokumentasi berupa tangkapan layar dari film *Tepatilah Janji* yang menunjukkan praktik politik uang dan tangkapan layar dari buku Bahasa Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi) yang menunjukkan pembelajaran tek

anekdot. Dalam hal ini, dokumentasi tersebut digunakan sebagai bukti penunjang dalam mengolah data.

#### **4. Analisis Data**

Menurut Umrati & Wijaya (2020, hlm. 115) analisis data merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan selama pelaksanaan penelitian, dimulai dari pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis data penelitian kualitatif Miles & Huberman (1992) dalam (Gunawan, 2013, hlm. 210–211) yang membagi tiga tahapan, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai analisis data dalam penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

##### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Menurut Sugiyono (2019, hlm. 247) mereduksi data merupakan proses penyaringan dan pemilihan informasi yang esensial dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang signifikan. Dalam tahap ini, peneliti mencari tema dan pola yang muncul dari data yang ada. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih rinci dan memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses analisis data berikutnya serta mempermudah pencarian data tersebut apabila diperlukan. Pada tahap ini, peneliti merangkum, memilah dan mencatat data penting tentang praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji*. Dalam hal ini juga, peneliti juga memilah pembelajaran teks anekdot yang relevan dengan hasil analisis dari praktik politik uang tersebut.

**b. Paparan Data (*Data Display*)**

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah memaparkannya. Menurut Miles & Huberman dalam (Gunawan, 2013, hlm. 211) memaparkan data adalah proses menyusun informasi secara sistematis untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti memaparkan data dalam bentuk deskriptif tentang praktik politik uang dalam film *Tepatilah Janji* dari perspektif sosiologi sastra. Selanjutnya peneliti juga memaparkan data secara deskriptif tentang relevansi praktik politik uang dalam film *Tepatilah Janji* dengan pembelajaran teks anekdot kelas X.

**c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/verifying*)**

Menurut Sugiyono (2019, hlm. 329) kesimpulan awal yang ditetapkan bersifat sementara dan dapat direvisi apabila tidak ditemukan bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika data tambahan dikumpulkan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan pada data secara keseluruhan. Proses ini melibatkan interpretasi dan analisis terhadap berbagai data, baik berupa observasi maupun dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil peneliti dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.